

Resepsi Pembaca SKH Kedaulatan Rakyat Mengenai Isu Pemberantasan Premanisme Paska Penyerangan Lapas Cebongan

J. Edo Nur Karensa / Y. Argo Twikromo

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Jl. Babarsari No. 6 Yogyakarta 55281

ABSTRAK

Penyerangan Lapas Cebongan, Sleman oleh oknum Kopassus melahirkan isu pemberantasan premanisme yang ramai diperdebatkan oleh masyarakat. Kelompok pro menyatakan bahwa Kopassus sudah berjasa menumpas premanisme di Yogyakarta. Sementara itu, kelompok kontra berpendapat oknum Kopassus ini melanggar HAM, dan pemberantasan premanisme hanya pengalihan isu media massa. Di SKH Kedaulatan Rakyat, pemberitaan isu pemberantasan premanisme disajikan sebagai tajuk-tajuk utama. Pemberitaan, kolom 'Analisis', hingga rubrik SMS 'Suara Rakyat' menyajikan dukungan terhadap pemberantasan premanisme. Informasi demikian tentu akan membentuk bagaimana pembaca memahami realitas sosial yang disajikan oleh media massa. Namun, pembaca bukan merupakan individu-individu yang memaknai informasi yang diserap secara linear dan dari sumber tunggal. Pembaca mengelaborasi informasi dari media massa dengan informasi yang didapatkan dari lingkungan sosialnya untuk membentuk pemahaman baru.

Kata kunci: resepsi, pemberantasan premanisme, Cebongan

A. Latar Belakang

“Sungguh ironis. Nyawa empat orang yang tengah tertidur pulas saat menjalani proses hukumnya hilang kena muntahan peluru segerombolan orang yang datang menyerbu. Proses hukum suatu peristiwa kekerasan didahului pula dengan kekerasan. Kekejian dilawan dengan kekejian. Maka, kekerasan pun dilanggengkan ketika sekelompok orang mempertontonkan kekuatan di arena publik. Aksi mereka disaksikan para sipir dan puluhan penghuni lembaga pemasyarakatan, yang bisa menimbulkan trauma panjang.”

(M. Ali Zaidan, Pengamat Hukum, “Pesan dari Cebongan”, Kompas, 26 Maret 2013)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta atau dikenal sebagai Lapas Cebongan diserang oleh sekelompok orang pada 23 Maret 2013. Empat tahanan Lapas dieksekusi dalam penyerangan yang terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Mereka adalah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait. Keempat tahanan tersebut ditahan karena menganiaya anggota Kopassus Sersan Satu Heru Santoso hingga tewas di Hugo’s Café, 19 Maret 2013.

Tujuh belas hari kemudian, Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigadir Jenderal Unggul Yudhoyono menyampaikan temuan bahwa pelaku penyerangan Lapas adalah 11 anggota Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kartasura. Temuan ini mengakhiri spekulasi publik mengenai siapa aktor penyerangan Lapas Cebongan. Sebelumnya, sebagian pengamat memang menduga penyerangan ini dilakukan oleh anggota Kopassus dengan motif balas dendam. Sebelumnya, salah satu anggota Kopassus, Sersan Satu Heru Santoso yang tewas dikeroyok oleh empat tahanan tersebut.

Paska pengumuman temuan Tim Investigasi TNI AD, publik dihadapkan dengan pro-kontra dengan tindakan 11 anggota Kopassus tersebut. Kalangan masyarakat yang pro terhadap tindakan anggota Kopassus menyatakan bahwa Yogyakarta perlu diamankan dari segala bentuk kekerasan dan premanisme. Sementara kalangan kontra menyangkan tindak main hakim sendiri ini. Terlebih, tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM) ini dilakukan oleh oknum lembaga pertahanan negara dan terjadi di ‘rumah negara’ yaitu Lembaga Pemasyarakatan.

Penyerangan Lapas Cebongan ini mengundang munculnya beberapa aksi dukungan pemberantasan premanisme muncul di Yogyakarta. Aksi ini muncul lewat spanduk-spanduk yang terpasang di berbagai sudut kota. Spanduk-spanduk tersebut berisi dukungan dan ucapan terima kasih atas pemberantasan premanisme di Yogyakarta: “Dukung TNI-Polri berantas premanisme”, “Sejuta Preman Mati, Rakyat Yogya Tidak Rugi”, “Kami salut & bangga pada jiwa ksatria Kopassus, Kopassus Ksatria Sejati”, “I Love TNI” dan “I Love Kopassus” (Detik.com, 13 Mei 2013).

Poster bernada kontra juga muncul. Sebuah poster berisi gambar seseorang dengan penutup muka berwarna hitam memegang senjata AK-47 bertuliskan “Awat, Preman Teriak Preman” terpampang di Jalan Mangkubumi dan Jalan Brigjen Katamso (MetroTVnews.com, 15 April 2013). Gambar tersebut menyiratkan adanya keterlibatan Kopassus karena penyerang menggunakan senjata AK-47. Walaupun bukan merupakan senjata organik Kopassus, AK-47 masih digunakan sebagai pegangan saat latihan (Merdeka.com, 7 April 2013).

Pro-kontra isu pemberantasan premanisme ini tidak hanya muncul dalam rupa poster. Beberapa kelompok massa melakukan beberapa aksi untuk menggalang dukungan penumpasan premanisme di Yogyakarta. Pada 7 April 2013, ratusan warga berkumpul di Tugu Yogya untuk menggelar aksi solidaritas semiliar koin untuk Ny Indria Afriyani (26), istri almarhum Serka Heru Santoso. Aksi solidaritas ini bukan aksi dukungan pemberantasan premanisme satu-satunya. Empat hari berselang, kelompok massa yang mengatasnamakan Komunitas Becak Malioboro dan Komunitas PKL menggalang dukungan pemberantasan premanisme di Yogyakarta dengan membagikan selebaran “Lawan Premanisme” sembari melakukan pawai di sepanjang Malioboro hingga kawasan Nol Kilometer (Detik.com, 11 April 2013).

Meski tidak sebanyak aksi dukungan pemberantasan premanisme, demonstrasi yang menuntut pelaku penyerang Lapas Cebongan diadili juga muncul. Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Indonesia Untuk Keadilan (KRIUK) melakukan demonstrasi di depan Polda DIY (Kompas.com, 23 April 2013). Kelompok ini menuntut Polda bergerak cepat dan aktif dalam penuntasan kasus Cebongan. Dalam aksi tersebut, spanduk bertuliskan “Rakyat bersatu adili pelanggar HAM demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” dibentangkan oleh demonstran.

Penyerangan oknum Kopassus ke Lapas Cebongan telah melahirkan isu yang akrab muncul di ruang-ruang publik, yaitu ‘pemberantasan premanisme’. Berbagai sudut kota Yogyakarta menjadi arena pertarungan opini melalui spanduk-spanduk, juga aksi turun ke jalan oleh beberapa kelompok massa. Tak hanya itu, pemberitaan penyerangan Lapas Cebongan di media massa juga menjadi identik dengan isu ini, seakan dua hal terkait yang tak bisa dipisahkan.

‘Pemberantasan premanisme’ sebenarnya bukan istilah baru. Pada tahun 1980-an, Indonesia pernah juga mengenal aksi pemberantasan premanisme, yang dikenal sebagai operasi *petrus* atau penembakan misterius. Aksi ini dilaksanakan oleh militer atas perintah Orde Baru sebagai respon atas tingginya aksi kriminalitas di masa itu. Cribb (2000) mencatat

bahwa respon sebagian besar masyarakat kala itu adalah positif, karena secara signifikan mampu mengurangi praktik kriminalitas di berbagai daerah, terutama Yogyakarta.

Munculnya isu pemberantasan premanisme paska penyerangan Lapas Cebongan, sadar atau tidak, kembali mengingatkan publik pada pemberantasan premanisme pada tahun 1980-an. Dampak yang muncul kemudian adalah bahwa pemberantasan premanisme dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan aksi main hakim sendiri oleh oknum Kopassus di Lapas Cebongan. Aktivis HAM sekaligus pengacara Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa munculnya dukungan terhadap pemberantasan premanisme jelas merupakan usaha pengalihan isu. “Ini pengalihan isu yang menyesatkan, seolah kita membenarkan tindakan melawan hukum yang dilakukan pasukan Kopassus,” kata Todung (Kompas.com, 23 April 2013).

Munculnya isu pemberantasan premanisme di media massa secara menjadi menarik karena ini merupakan suatu isu yang terus diperdebatkan oleh masyarakat. Dominannya isu pemberantasan premanisme di media massa tentu akan menimbulkan pertanyaan; benarkah ini merupakan aspirasi masyarakat? Apakah hal ini merupakan upaya media massa memengaruhi khalayak atau adakah ini merupakan manifestasi dari kepentingan kelompok tertentu? Dan tentu pertanyaan yang terkait dengan aktivitas konsumsi media adalah bagaimana khalayak memaknai munculnya isu publik tersebut di media massa.

Untuk memahami bagaimana isu publik itu diterima oleh masyarakat, pendekatan perlu diarahkan kepada khalayak sebagai bagian dari masyarakat. Dahlgren (dalam Harindranath, 2009) mengungkapkan bahwa irisan antara khalayak dan media masyarakat ini merupakan suatu alternatif yang relevan dalam suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis dan menilai permasalahan komunikasi melalui makna, identitas, dan agen sosial. Adapun, studi resepsi merupakan studi yang fokus menggali makna yang tercipta dalam diri khalayak dalam aktivitas konsumsi media massa.

Pemaknaan khalayak atas suatu isu publik merupakan bagian penting untuk melihat perlakuan terhadap isu publik. Media massa menjadi suatu sarana yang tepat untuk melihat bagaimana pro-kontra mengenai suatu isu publik ini terjadi dalam masyarakat, karena dalam aktivitas mengonsumsi media massa khalayak terlibat dalam suatu momen yang disebut *‘potential moment of citizenship’* atau momen dimana peran sebagai khalayak dan masyarakat beririsan. Ide ini dicetuskan oleh Harindranath (2009: 13) dimana ia merekomendasikan sebuah reformulasi mengenai aktivitas khalayak dan pembacaannya sebagai sebuah *‘potential moment of citizenship’*, yang memungkinkan eksplorasi resepsi media dan konteksnya dalam memahami hubungan sebagai masyarakat sipil.

Dalam rangkaian kejadian penyerangan Lapas Cebongan, Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat menyajikan isu pemberantasan premanisme. Isu ini muncul melalui pemberitaan, kolom 'Analisis', hingga rubrik SMS 'Suara Rakyat'. Pada 2 April 2013, *headline* harian ini berbunyi "Pascainsiden, Lapas Cebongan Dijaga Brimob: Kriminalitas di DIY Menurun". Kedaulatan Rakyat cenderung menyajikan isu pemberantasan premanisme dibanding permasalahan penyerangan Lapas Cebongan oleh oknum Kopassus. Hal ini terkesan menonjol karena harian lokal lain tidak menyajikan isu ini sebagai tajuk utama. Pada periode yang sama (2-5 April 2013), harian *Bernas Jogja* menyampaikan berita mengenai pendapat berbagai pihak seperti Komnas HAM, GKR Hemas, dan upaya TNI-Polda dalam menangani kasus ini. Sementara itu, *Tribun Jogja* menyajikan pemberitaan mengenai langkah-langkah yang dilakukan baik TNI dan Polda untuk menyelesaikan kasus Cebongan.

Kecenderungan SKH Kedaulatan Rakyat dalam memberitakan isu pemberantasan premanisme ini tentu menjadi menarik apabila khalayak diberikan ruang untuk mengungkapkan subyektifitasnya dalam memandang isu ini. Eriyanto (2009: 14) melihat bahwa berita pada dasarnya bukan suatu ruang yang vakum, berita bukan teks yang berdialog dengan dirinya sendiri, namun berita mencoba untuk memetakan masalah kepada pembaca lewat konstruksi yang dibangun sekaligus mengajak pembaca untuk melihat bagaimana suatu peristiwa dimaknai. Peran media dalam memetakan masalah ini kemudian dapat menjadi salah satu kunci yang menentukan bagaimana khalayak akan memahami duduk perkara. Namun khalayak juga bukan sekumpulan orang yang menerima berita apa adanya. Croyte dan Hoynes (2003: 266) mengungkapkan bahwa khalayak melakukan kontekstualisasi makna tersebut dengan latar belakang pengetahuan mereka yang akan mendasari resepsi mereka.

Dalam situasi pro-kontra soal penyerangan Lapas Cebongan, pemberitaan isu pemberantasan premanisme secara dominan tentu akan menjadi pertimbangan bagi khalayak dalam menentukan sikap. Media massa bisa menjadi arena pertarungan antara pihak pro dan kontra. Gorton (2009: 20) menyatakan bahwa pemberitaan media massa banyak memengaruhi bentuk dari kebijakan sosial dengan mendikte bagaimana isu-isu politik diperdebatkan.

Media menjadi arena dimana kepentingan-kepentingan bertarung untuk memperebutkan impresi khalayak. Dalam konteks tarik menarik kepentingan (*spurious*), sejatinya media massa memiliki fungsi sebagai pencerita keadaan. Posisi tersebut memungkinkan media massa berada dalam kepentingan manapun. Nunung Prajanto (2004: 2) menyatakan bahwa ayunan pendulum dalam melaksanakan fungsi memungkinkan media

massa untuk berada dalam posisi manapun. Media akan tetap mampu menjaga netralitas asal tetap mau berayun, dan tidak berhenti pada suatu titik yang dipaksakan.

Isu pemberantasan premanisme yang muncul di Kedaulatan Rakyat menjadi sangat menarik untuk ditelusur asal-usulnya. Aksi turun ke jalan dan poster-poster dukungan pemberantasan premanisme akan menjadi pertimbangan dalam menentukan hubungan media dan masyarakat dalam isu ini. SKH Kedaulatan Rakyat tidak dapat sekonyong-konyong dikatakan sebagai pembentuk isu. Begitupun, aksi dukungan pemberantasan premanisme tidak dapat begitu saja dikatakan sebagai aspirasi masyarakat.

Studi khalayak adalah sarana yang tepat untuk memahami persoalan ini. Hal ini mungkin dilakukan dengan melibatkan individu-individu yang mengonsumsi teks, namun sekaligus memiliki konteks pengetahuan dan latar belakang masing-masing. Menghadapi gempuran informasi, khalayak menjadi pusat dari komunikasi massa. Stuart Hall (1980) melihat bahwa khalayak tidak dapat lagi dilihat sebagai sekelompok individu yang memiliki posisi yang lemah di hadapan teks-teks media massa. Melainkan khalayak mempunyai kemampuan secara aktif untuk melakukan pemaknaan terhadap teks-teks media.

Penelitian terhadap pembaca Kedaulatan Rakyat menjadi menarik karena KR merupakan harian lokal paling laris di Yogyakarta dengan oplah 124.539 eksemplar per hari (Kedaulatan Rakyat, 2012). Harian ini memenangkan 47,63% pasar surat kabar harian di Yogyakarta. Angka ini menjadi sangat penting untuk mendasari urgensi penelitian ini. SKH Kedaulatan Rakyat yang mengangkat isu pemberantasan premanisme punya kesempatan untuk menggiring pemahaman publik mengenai duduk perkara kejadian Lapas Cebongan.

Khalayak akan melakukan pemaknaan terhadap pesan-pesan media massa yang dikonsumsi. Studi resepsi khalayak akan menunjukkan bagaimana khalayak memaknai isu publik yang dikelilingi pro-kontra seperti isu pemberantasan premanisme. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengangkat bagaimana judul penelitian "*Resepsi Pembaca SKH Kedaulatan Rakyat Mengenai Isu Pemberantasan Premanisme Paska Penyerangan Lapas Cebongan*".

B. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui resepsi pembaca SKH Kedaulatan Rakyat mengenai isu pemberantasan premanisme paska penyerangan Lapas Cebongan.

C. Pembahasan

1. Isu Pemberantasan Premanisme di SKH Kedaulatan Rakyat

Di SKH Kedaulatan Rakyat ditemukan empat premis utama yang berkaitan dengan isu pemberantasan premanisme. Adapun, premis-premis tersebut antara lain; 1) kriminalitas di DIY menurun; 2) tindakan mengeksekusi empat tahanan Lapas adalah cerminan jiwa korsa Kopassus; 3) tindakan oknum Kopassus tidak melanggar HAM; 4) masyarakat mendukung aksi pemberantasan premanisme. Berikut ini adalah penjabaran premis-premis yang ditemukan dalam pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat:

a. Kriminalitas di DIY Menurun

SKH Kedaulatan Rakyat menampilkan headline berjudul ‘Kriminalitas di DIY Menurun’. Asumsi bahwa penyerangan Lapas Cebongan ini berdampak pada turunnya angka kriminalitas di DIY coba diungkapkan oleh Kedaulatan Rakyat. SKH Kedaulatan Rakyat mencoba untuk mencari keterkaitan antara turunnya angka kriminalitas di DIY dengan kejadian penembakan empat tahanan di Lapas Cebongan. Fakta ini mencoba membangun asumsi bahwa empat tahanan Lapas yang dieksekusi adalah pelaku kriminal berat sehingga pengeksekusian empat berdampak pada turunnya angka kriminalitas di DIY.

b. Tindakan Mengeksekusi Empat Tahanan Lapas adalah Cerminan Jiwa Korsa Kopassus

Motif oknum Kopassus mengeksekusi Deki dan tiga tahanan lain diduga adalah perkara balas dendam atas terbunuhnya Serka Heru Santoso. Namun, naskah-naskah berita yang muncul di SKH Kedaulatan Rakyat menggiring pada pemahaman bahwa tindakan ini sejatinya didasari oleh jiwa korsa Kopassus. Adapun, jiwa korsa adalah suatu semangat keakraban, perasaan kesatuan, perasaan kekitaan, atau suatu kecintaan terhadap kesatuan atau korps. Tidak hanya melalui pemberitaan, SKH Kedaulatan Rakyat juga memberikan ruang pada pendapat masyarakat yang menganggap bahwa tindakan oknum Kopassus ini merupakan bentuk jiwa korsa yang pantas dipuji. Pendapat-pendapat ini dimunculkan lewat rubrik ‘SMS Suara Rakyat’.

c. Tindakan Oknum Kopassus Tidak Melanggar HAM

Isu HAM di SKH Kedaulatan Rakyat disajikan dalam perspektif yang berbeda dengan Komnas HAM ataupun pihak yang kontra tindakan Kopassus. Prof. Dr. Sudjito SH, M.Si

menulis sebuah kolom *Analisis* untuk Kedaulatan Rakyat mengenai HAM. Dalam kolom tersebut, Guru Besar Ilmu Hukum UGM ini mencoba untuk mempertanyakan kembali perspektif HAM yang digunakan oleh Komnas HAM untuk memandang kasus Cebongan. Menurutnya, ada reduksi persoalan HAM yang disajikan oleh Komnas HAM. Sebagian SMS yang ditampilkan dalam rubrik ini meminta Komnas HAM juga mempertimbangkan bagaimana hak masyarakat yang selama ini dirampas oleh para preman. Tudingan bahwa Komnas HAM tebang pilih juga muncul. Pembelaan terhadap tahanan Lapas yang dieksekusi oleh oknum Kopassus dianggap sebagai pengabaian terhadap pelanggaran HAM yang selama ini dilakukan terhadap masyarakat. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa Kedaulatan Rakyat menyajikan sebuah pandangan dimana pembelaan Komnas HAM pada korban penyerangan Lapas adalah sebuah tindakan tebang pilih.

d. Masyarakat Mendukung Pemberantasan Premanisme

Pemberitaan di SKH Kedaulatan Rakyat mengindikasikan bahwa aksi oknum Kopassus mengeksekusi empat tahanan di Lapas Cebongan ini didukung oleh masyarakat. Pemberitaan mengenai unjuk rasa dan poster-poster yang muncul pasca penyerangan Lapas Cebongan ditampilkan di SKH Kedaulatan Rakyat. Isinya adalah mendukung Kopassus dalam memberantas premanisme di Yogyakarta. Tindakan oknum Kopassus mengeksekusi empat tahanan Lapas ini bahkan dapat diterima dengan alasan bahwa mereka yang dieksekusi adalah preman.

2. Resepsi Pembaca SKH Kedaulatan Rakyat Mengenai Isu Pemberantasan Premanisme

Isu pemberantasan premanisme yang dikonsumsi oleh pembaca SKH Kedaulatan Rakyat menghasilkan berbagai macam respon. Kerangka resepsi Carolyn Michele (2007) membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana resepsi khalayak terhadap isu pemberantasan premanisme. Kerangka resepsi ini menempatkan dua level pemaknaan khalayak, yaitu makna level denotatif dan makna level konotatif, serta evaluasi guna membaca dampak hegemonik yang terjadi pada pembaca.

Dalam pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat, ditemukan empat premis utama yang berkaitan dengan isu pemberantasan premanisme. Adapun, premis-premis tersebut antara lain; 1) kriminalitas di DIY menurun; 2) tindakan mengeksekusi empat tahanan Lapas adalah cerminan jiwa korsa Kopassus; 3) tindakan oknum Kopassus tidak melanggar HAM; 4) masyarakat mendukung aksi pemberantasan premanisme. Keempat premis ini digunakan untuk melihat respon informan terhadap isu pemberantasan premanisme.

Pada makna level denotatif, premis kriminalitas di DIY menempatkan informan Masta dan Alex dalam *referential mode*. Sementara Sari berada dalam *mediated mode*. Masta mendasarkan penilaiannya terhadap turunnya kriminalitas di DIY pada pengalamannya, dimana ia tidak pernah merasakan kriminalitas (*referential*). Sementara itu, Alex menilai bahwa menurunnya kriminalitas paska penyerangan Lapas Cebongan adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan praktik kriminalitas ataupun premanisme tidak berkurang. Sari melihat bahwa Kedaulatan Rakyat membangun asumsi turunnya kriminalitas di DIY tanpa kriteria yang jelas (*mediated*).

Pada premis mengenai jiwa korsa Kopassus, informan Sari dan Masta berada dalam *referential mode*, sementara Alex pada *mediated mode*. Masta memandang bahwa jiwa korsa bukan alasan Kopassus menyerang Lapas, melainkan karena relasi pertemanan. Lebih jauh, ia berpikir bahwa sudah ada hukum yang berjalan, sehingga tindakan Kopassus tidak perlu dilakukan. Sementara itu, Sari mengandaikan Serka Santoso tahu bahwa temannya akan membunuh empat tahanan itu, ia mungkin tidak setuju dengan tindakan oknum Kopassus ini. Sejatinya, penyerangan ini didasari oleh rasa emosi. Alex memandang Kedaulatan Rakyat gagal menyajikan perimbangan berita. Ia menyebutkan Kedaulatan Rakyat tidak pernah mengutip pandangan dari korban penyerangan Lapas.

Ketiga informan berada dalam *referential mode* dalam premis mengenai pelanggaran HAM. Masta berpandangan bahwa tindakan Kopassus ini telah menghilangkan hak hidup dan hak untuk mendapatkan keadilan empat tahanan Lapas. Sari berpendapat tindakan oknum Kopassus ini menghalangi proses keadilan dimana empat tahanan dapat mendapatkan keadilan. Sementara itu Alex membandingkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh empat tahanan dengan Kopassus.

Informan Masta dan Sari berada dalam *transparent mode* mengenai dukungan masyarakat terhadap pemberantasan premanisme, sementara Alex berada pada *referential mode*. Masta memandang bahwa selama ini sudah jengah terhadap praktik premanisme sehingga dukungan ini benar ada di masyarakat. Sari berpendapat bahwa masyarakat memang mendukung pemberantasan premanisme, namun tidak dengan cara seperti ini. Alex memandang bagi masyarakat yang hidup di tengah praktik premanisme, dukungan itu wajar muncul.

Pada makna level konotatif, informan Masta mengidentifikasi bahwa Kedaulatan Rakyat mau mengajak agar pemberantasan premanisme tidak dilakukan dengan cara-cara kasar seperti ini. Sementara itu, motivasi yang dilihat oleh Masta adalah agar pembaca tidak memandang kasus ini hanya dari satu sisi, melainkan juga melihat asal-muasal kejadian

Lapas Cebongan. Implikasi yang muncul kemudian adalah pembaca diajak untuk melihat asal-muasal kejadian, termasuk apa yang terjadi di Hugo's Café. Masta berada dalam posisi respon *negotiated reading*, namun evaluasi peneliti yang dilakukan pada pernyataan-pernyataan Masta menempatkannya dalam kelompok evaluasi *hegemonic reading*.

Sementara itu, informan Sari mengidentifikasi bahwa Kedaulatan Rakyat menyuarkan supremasi hukum dimana selama ini preman bisa hidup dan bagaimana perlindungan bagi masyarakat. Motivasinya adalah untuk mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah tegas termasuk secara hukum terhadap keberadaan preman. Implikasi yang muncul kemudian menurut Sari adalah membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin berkurang. Informan Sari berada dalam respon *negotiated reading*. Ide Sari yang melontarkan wacana supremasi hukum dalam isu pemberantasan premanisme menempatkannya dalam kelompok evaluasi *contesting reading*.

Alex menyatakan bahwa pesan utama yang hendak disampaikan oleh Kedaulatan Rakyat adalah pemberantasan premanisme ini harus didukung. Motivasi utamanya adalah membuat semua masyarakat mendukung isu pemberantasan premanisme. Implikasi yang mungkin muncul menurut Alex, ketika banyak masyarakat mendukung pemberantasan premanisme adalah bahwa hukuman Kopassus akan berkurang karena simpati masyarakat. Alex berada dalam respon *negotiated reading*, namun pernyataan-pernyataan yang dilontarkan menempatkannya pada kelompok evaluasi *counter-hegemonic reading*.

Resepsi pembaca SKH Kedaulatan Rakyat mengenai isu pemberantasan premanisme mengindikasikan bahwa pemaknaan yang terjadi akan melibatkan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan aktivitas membaca. Informasi yang diserap oleh pembaca dari SKH Kedaulatan Rakyat tidak kemudian menjadi bahan tunggal dan utama untuk menilai isu pemberantasan premanisme. Lingkungan sosial, pengetahuan, dan pengalaman pribadi menjadi faktor pembeda resepsi dari masing-masing pembaca.

Dengan kata lain, pemaknaan atas isu pemberantasan premanisme dilakukan oleh pembaca melalui hasil refleksi dan pencocokan atas pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Masta menggunakan cerita Mama dan Eyangnya sebagai salah satu informasi untuk menilai preman dan orang dari Indonesia timur. Sari menggunakan informasi mengenai pelanggaran HAM di Papua sebagai dasar untuk mengatakan bahwa TNI kerap kali melakukan tindakan sewenang-wenang. Sementara itu, Alex menilai bahwa isu pemberantasan premanisme ini hadir semata-mata untuk menutupi kasus Cebongan dan peradilan bagi oknum Kopassus.

Penelitian resepsi Carolyn Michelle ini juga menunjukkan bahwa pemahaman dan respon yang dilontarkan oleh informan tidak kemudian sejalan dengan dampak hegemonik yang dihasilkan dari konsumsi media massa. Informan bisa saja berada dalam respon level konotatif *negotiated reading*, namun dirinya terkena dampak *hegemonic reading* karena telah memahami dan menelan informasi dari teks media secara linear. Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan informan akan membantu peneliti memahami bagaimana teks media dipahami oleh informan. Dalam isu pemberantasan premanisme ini, model resepsi Carolyn Michelle mampu membantu dalam memisahkan respon pembaca dengan dampak hegemonik yang terjadi pada dirinya.

3. Resepsi: Individu Menentukan Makna

Isu pemberantasan premanisme yang muncul di SKH Kedaulatan Rakyat merupakan suatu topik yang menarik untuk melihat bagaimana hubungan antara media dan masyarakat. Setiap informan memiliki cara pemaknaan yang unik. Informan Masta menganggap bahwa isu pemberantasan premanisme ini merupakan akumulasi dari keresahan masyarakat mengenai kriminalitas dan premanisme yang selama ini ada di Yogyakarta. Sementara itu, informan Sari menilai bahwa isu ini timbul sebagai bentuk ketidak-puasan masyarakat atas supremasi hukum yang ada selama ini. Informan Alex menilai bahwa isu pemberantasan premanisme digunakan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari ancaman hukuman yang mungkin diberikan pada anggota Kopassus yang menyerang Lapas Cebongan.

Kedaulatan Rakyat menentukan informasi apa yang perlu diketahui pembaca atau tidak. Pendalaman informasi yang dilakukan oleh Kedaulatan dilakukan pada empat premis yaitu: 1) kriminalitas di DIY menurun; 2) tindakan mengeksekusi empat tahanan Lapas adalah cerminan jiwa korsa Kopassus; 3) tindakan oknum Kopassus tidak melanggar HAM; 4) masyarakat mendukung aksi pemberantasan premanisme. Empat premis ini disajikan dalam rangka membangun pemahaman khalayak mengenai isu pemberantasan premanisme.

Gorton (2009: 20) melihat bahwa pemberitaan media massa banyak memengaruhi bentuk dari kebijakan sosial dengan mendikte bagaimana isu-isu politik diperdebatkan di media massa. Isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik diperdebatkan di media massa untuk menuju suatu pemahaman khalayak yang seragam. Upaya mendikte isu pemberantasan premanisme hadir lewat pemberitaan, visual foto, kolom 'Analisis', hingga rubrik SMS Suara Rakyat. Kekuatan untuk memengaruhi khalayak ini muncul melalui suatu produksi media massa yang dirancang sedemikian rupa oleh SKH Kedaulatan Rakyat untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu dukungan terhadap isu pemberantasan premanisme.

Meski demikian, hasil resepsi pembaca SKH Kedaulatan Rakyat menunjukkan bahwa sejatinya khalayak tidak dapat dipandang sebagai individu-individu yang lemah di hadapan teks. Sebagian dari khalayak memiliki kemampuan mengevaluasi konten media dan tidak terbawa dengan alur persuasi media massa. Nick Couldry (2007: 16) menyatakan bahwa menjadi khalayak hanyalah satu dari berbagai kegiatan sehari-hari, dan media merupakan satu dari banyak sumber makna dan pengaruh (*Being part of an audience is just one of many activities in daily life, and media just one of many sources of meaning and influence*). Pendapat ini menunjukkan bahwa ‘menjadi khalayak’ adalah hanya salah satu aktivitas yang dijalani oleh individu. Sehingga media tidak hanya menjadi sumber informasi satu-satunya bagi khalayak dalam menentukan pemaknaan terhadap suatu realitas sosial.

Informan Masta mendapatkan penguatan atas informasi yang dikonsumsi dari SKH Kedaulatan Rakyat berupa cerita dan pengalaman dari orang di lingkungannya, yaitu Ibu dan Nenek. Keberadaan orang-orang dari Indonesia bagian timur yang kerap mengganggu masyarakat pernah diceritakan oleh Ibu dan Nenek Masta. Pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat yang menyiratkan bahwa preman-preman ini berasal dari luar kota Yogyakarta akan semakin memperkuat pandangan Masta mengenai preman.

“Ya yang jelas, orang tuaku selalu menghimbau untuk hati-hati dengan orang-orang seperti itu (preman yang berasal dari Indonesia timur, red peneliti). Soalnya mereka tingkat sensitifnya tinggi sekali. Dan, kalau misalnya di jalan, kalau ada orang lagi ngamuk atau mabuk, berusaha untuk menghindar. Pertama, untuk menghindar. Kedua jangan pernah, ngelakson atau ngatain. Soalnya itu mereka itu kan langsung naik. Namanya juga preman.” (Masta, wawancara 19 November 2013)

Sementara itu, Alex berpandangan berbeda sama sekali dengan Masta. Ia berpendapat bahwa isu pemberantasan premanisme ini semata-mata hadir untuk menutupi kasus Lapas Cebongan. Isu pemberantasan premanisme digunakan oleh Kedaulatan Rakyat sebagai sarana untuk mendukung Kopassus hingga tuntutan proses peradilan kepada oknum Kopassus ini perlahan-lahan tertutup dengan simpati masyarakat terhadap pemberantasan preman. Suksesnya pembunuhan misterius atau Petrus di tahun 1980-an, menurut Alex tidak semata-mata meninggalkan dampak positif berupa kriminalitas menurun, melainkan juga rasa sakit hati yang mendalam bagi keluarga korban Petrus.

“Mereka sebenarnya tidak berpikir berapa orang yang sangat membenci Kopassus. Terutama sejak masa ‘petrus’. Berapa banyak orang akhirnya yang justru anaknya itu tidak dibolehkan masuk TNI. Tidak ikut tes polisi karena keadaannya saat itu. Berapa banyak keluarga yang kehilangan keluarganya. Mereka tidak kenal itu. Tidak tahu itu. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang punya anak-anak itu bukan orang-orang di daerah kota. Tapi orang-orang pendatang yang datang dari jauh. Kayak Deki cs itu, itu keluarganya bukan di kota besar. Keluarganya jaaaauuuh di kabupaten. Kecil. Dan mereka bukan siapa-siapa disana.” (Alex, wawancara 11 November 2013)

Hal demikian juga terjadi pada Sari. Penilaian Sari mengenai isu pemberantasan premanisme mengerucut pada kritik terhadap supremasi hukum yang ada di Indonesia.

Menurut Sari, aparat seperti Polisi dan TNI belum berhasil mengatasi masalah premanisme. Tindakan oknum Kopassus di Lapas Cebongan ini justru memperburuk citra supremasi hukum di mata Sari. Pandangan ini bukan berasal tanpa alasan. Sari membaca berbagai laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI di tanah Papua, sehingga ia dapat menyatakan bahwa tindakan sewenang-wenang TNI adalah gejala umum yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Beruntung, Yogyakarta adalah salah satu kota dengan jumlah aktivis yang banyak dan menjadi perhatian, sehingga kasus Cebongan bisa muncul di media massa.

“Dan, aku juga pernah membaca beberapa report di Papua, tentang HAM. Waktu itu aku ikut menterjemahkan sebuah report dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan disitu banyak sekali kasus kejadian dimana rakyat-rakyat Papua, warga sipil, mereka dianiaya oleh TNI. Dan hal seperti ini pun tidak begitu terdengar. Ditutup-tutupi di lingkup Papua sendiri, gak mencuat sampai disini.” (Sari, wawancara 2 Desember 2013)

Ketiga informan ini mampu menyajikan bagaimana makna secara dinamis berkembang dalam individu-individu berdasarkan latar pengetahuan dan lingkungan sosial masyarakat yang melingkupi. Temuan ini memperkuat pandangan Stanley Fish (dalam Littlejohn, 2008: 196) bahwa makna naskah terletak pada pembaca. Naskah yang merangsang pembaca untuk aktif menginterpretasi makna. Fish menguraikan definisi dari pembaca adalah komunitas interpretif, yaitu kelompok yang saling berinteraksi, membentuk realitas dan pemaknaan umum, serta menggunakannya dalam pembacaan mereka.

Ide yang mirip dikemukakan oleh David Croteau dan William Hoynes (2003). Menurut Croteau dan Hoynes, Pembaca adalah khalayak aktif (*active audience*) karena persepsi yang mereka tangkap dari berita tersebut tidak secara langsung terbentuk. Sebaliknya, pembaca melakukan kontekstualisasi makna tersebut dengan latar belakang pengetahuan mereka yang akan mendasari resepsi mereka. Latar belakang Masta dimana ia hidup di lingkungan rumah yang tidak nyaman dengan keberadaan orang dari Indonesia timur memperkuat label preman yang melekat pada pendatang yang berasal dari daerah tersebut.

Hal demikian juga terjadi pada informan Sari yang memandang bahwa kesewenang-wenangan aparat TNI sudah banyak terjadi di Indonesia. Laporan pelanggaran HAM di Papua yang pernah dibaca menggiring Sari pada kesimpulan bahwa supremasi hukum selama ini masih lemah. Sementara itu, informan Alex menyatakan tidak pernah setuju dengan tindakan oknum Kopassus yang memberantas premanisme dengan cara-cara kekerasan. Ia memandang bahwa dampak buruk yang ditimbulkan dari aksi-aksi tersebut tidak pernah diperhitungkan oleh pihak Kopassus.

Masing-masing pembaca melakukan modifikasi menurut sudut pandang mereka sendiri sehingga makna tersebut sesuai dengan keinginannya. Konsep khalayak aktif ini menumbangkan anggapan bahwa media mendominasi cara khalayak memahami pesan. Temuan ini juga mematahkan argumen bahwa bias politik dan moral dalam media dapat menyebabkan keunggulan opini tertentu di antara khalayak. Asumsi Hodgkinson (2007: 4) bahwa konten media secara umum dalam masyarakat tertentu dapat berdampak sejauh mana masyarakat tersebut memiliki informasi, terlibat, dan kreatif terbukti dalam pembacaan Masta, Sari dan Alex. Ketiga informan penelitian menyajikan suatu cara pembacaan yang melibatkan aspek lingkungan sosial masyarakat, pengetahuan, dan pengalaman masa lalu.

D. Kesimpulan

Resepsi pembaca SKH Kedaulatan Rakyat mengenai isu pemberantasan premanisme mengindikasikan bahwa pemaknaan yang terjadi akan melibatkan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan aktivitas membaca. Informasi yang diserap oleh pembaca dari SKH Kedaulatan Rakyat tidak kemudian menjadi bahan tunggal dan utama untuk menilai isu pemberantasan premanisme. Lingkungan sosial, pengetahuan, dan pengalaman pribadi menjadi faktor pembeda resepsi dari masing-masing pembaca.

Penelitian resepsi Carolyn Michelle ini juga menunjukkan bahwa pemahaman dan respon yang dilontarkan oleh informan tidak kemudian sejalan dengan dampak hegemonik yang dihasilkan dari konsumsi media massa. Informan bisa saja berada dalam respon level konotatif *negotiated reading*, namun dirinya terkena dampak *hegemonic reading* karena telah memahami dan menelan informasi dari teks media secara linear.

Daftar Pustaka

- Couldry, Nick, Sonia Livingstone dan Tim Markham. (2007). *Media Consumption and Public Engagement: Beyond the Presumption of Attention*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Croteau, David dan William Hoynes. (2003). *Media Society: Industries, Images, and Audiences, 3rd edition*. United States of America: Sage Publications, Inc.
- Eriyanto. (2009). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Gorton, Kristyn. (2009). *Media Audiences: Television, Meaning, and Emotion*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Hall, Stuart. (1980). "Encoding/Decoding" dalam Hall, Stuart, Dorothy Hobson, Andrew Lowe, dan Paul Willis (ed). *Culture, Media, Language*. London: Hutchinson.
- Harindranath, Ramaswari. (2009). *Audience-Citizens: The Media, Public Knowledge, and Interpretive Practice*. New Delhi: SAGE Publications Pvt Ltd.

- Littlejohn, Stephen W, dan Karen A. Foss. (2008). Teori Komunikasi: *Theories of Human Communication*, 9th ed. Jakarta: Salemba Humanika.
- Michelle, Carolyn. (2007). “*Modes of Reception: A Consolidated Analytical Framework*” dalam *The Communication Review*. London: Taylor & Francis.
- Prajanto, Nunung. (2004). “*Menjembatani Negara dan Masyarakat*” dalam Prajanto, Nunung. *Komunikasi, Negara, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Sumber Internet:

- Detik.com. (2013, 11 April). “*Pasca Kasus LP Cebongan: Poster & Spanduk Dukung TNI-Polri Berantas Preman Kian Bertebaran di Yogya*”. Diakses pada 13 Mei 2013, 11.00 WIB dari (<http://news.detik.com/read/2013/04/11/141548/2217656/10/poster-spanduk-dukung-tni-polri-berantas-preman-kian-bertebaran-di-yogya>).
- Detik.com. (2013, 11 April). “*Tukang Becak & PKL di Yogya Demo Desak Pemberantasan Preman*”. Diakses pada 13 Mei 2013, 11.15 WIB dari (<http://news.detik.com/read/2013/04/11/123642/2217544/10/tukang-becak-pkl-di-yogya-demo-desak-pemberantasan-preman?9922032>).
- Kompas.com. (2013, 23 April). “*Peringati Penyerangan Lapas Cebongan, Mahasiswa Demo di Polda*”. Diakses pada 10 Juli 2013, 12.22 WIB dari (<http://regional.kompas.com/read/2013/04/23/17371030/Peringati.Penyerangan.Lapas.Cebongan.Mahasiswa.Demo.di.Polda>).
- Kompas.com. (2013, 23 April). “*Todung: Pembelokan Kasus Cebongan Menyesatkan*”, Diakses pada 13 Mei 2013, 10.21 WIB dari (<http://nasional.kompas.com/read/2013/04/23/12484717/Todung.Pembelokan.Kasus.Cebongan.Menyesatkan>).
- MetroTVnews. (2013, 15 April). “*Preman Teriak Preman*”. MetroTVnews.com. (<http://www.metrotvnews.com/foto/detail/2013/04/15/6/2528/Preman-Teriak-Preman>). Diakses pada 10 Juli 2013, 11.45 WIB.
- Merdeka.com. (2013, 7 April). “*Deretan Senjata Maut yang Dimiliki Kopassus*”. Diakses pada 11 Juli 2013, 12.20 WIB dari (<http://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-senjata-maut-yang-dimiliki-kopassus.html>).